

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan, penghindaran pajak, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Deskripsi konseptual merupakan proses identifikasi dan penguraian teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian, sehingga berfungsi sebagai kerangka referensi yang sistematis dan terstruktur untuk memahami fenomena yang dikaji. Melalui kajian konseptual ini, peneliti mengintegrasikan berbagai konsep, model, dan temuan empiris dari literatur akademik yang relevan guna memperkuat argumentasi teoretis serta menjelaskan hubungan antarkonsep dalam penelitian. Dengan demikian, bagian ini menjadi fondasi ilmiah yang penting untuk merumuskan indikator variabel, memetakan arah analisis, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), di mana *principal* mendelegasikan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada *agent* untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam

kerangka teori ini, diasumsikan bahwa hubungan tersebut dapat berjalan efektif apabila *principal* dan *agent* mampu mengoptimalkan keselarasan kepentingan sehingga *agent* tidak terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan atau memprioritaskan kepentingan pribadi (Kurniadi et al., 2023). Teori agensi juga digunakan sebagai dasar untuk mendeteksi potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajer, khususnya dalam bentuk manipulasi laba (Limmousine & Christian, 2024). Praktik manipulasi tersebut umumnya muncul akibat perbedaan kepentingan antara *principal* sebagai pemilik modal dan *agent* sebagai pihak yang menjalankan aktivitas operasional perusahaan .

Permasalahan utama dalam hubungan keagenan biasanya berkaitan dengan asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dan lebih rinci mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham (Frans, 2021). Dalam konteks ini, manajer sering kali dinilai berdasarkan tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga memiliki insentif untuk memanfaatkan keunggulan informasi tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan atau ketidakwajaran dalam pelaporan laba, manajer menjadi pihak yang paling mungkin diduga sebagai sumber munculnya konflik keagenan tersebut (Taufiq, 2022). Dengan demikian, teori agensi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana ketidakseimbangan informasi dan perbedaan kepentingan dapat memicu praktik manajemen laba dalam suatu entitas bisnis

2.1.2. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* pertama kali dikemukakan oleh Freeman (1984) teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan (*stakeholders*), seperti *investor*, kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat (Tsaqif & Agustiningsih, 2021). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menciptakan nilai (*value*) bagi seluruh *stakeholder* melalui pengelolaan perusahaan yang transparan, *akuntabel*, dan bertanggung jawab (Yahya & Laksito, 2022).

Menurut teori *stakeholder*, keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan para *stakeholder*. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dan bebas dari praktik manipulasi (Indriastuti & Kartika, 2023). Informasi keuangan yang disajikan secara transparan akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan serta mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi (Ersadarih & Ratmono, 2024). Sebaliknya, praktik manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menimbulkan asimetri informasi yang berpotensi merugikan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tepat (Pricillia et al., 2025).

Dalam perspektif teori *stakeholder*, keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan berperan penting dalam menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen (Sicaprio et al., 2024). Dewan komisaris independen dan komite audit memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan manajemen, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan

prinsip *good corporate governance*, serta meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Melalui fungsi pengawasan yang efektif, kedua mekanisme tata kelola tersebut diharapkan mampu meminimalkan praktik manajemen laba sehingga informasi yang disajikan kepada *stakeholder* mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Khaerunnisa & Soerono, 2025). Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris independen dan komite audit diharapkan mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik manajemen laba, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara andal dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang berkualitas bagi para *stakeholder* secara konsisten dan keberlanjutan (Karina & Liliana, 2025).

Dalam penelitian ini, teori *stakeholder* digunakan sebagai landasan teoretis untuk menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak, profitabilitas, serta mekanisme tata kelola perusahaan yang diprosikan oleh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap praktik manajemen laba (Nastiti & Susanto, 2022). Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan sehingga mampu melindungi kepentingan seluruh *stakeholder* (Setyani & Suhaili, 2023). Dengan demikian, semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris independen dan komite audit, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan praktik manajemen laba yang dapat merugikan *stakeholder*.

2.1.3. Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk mengubah atau memodifikasi informasi dalam laporan keuangan sehingga menghasilkan penyajian yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) karena informasi yang disampaikan menjadi kurang reliabel dalam proses pengambilan keputusan (Immanuel et al., 2022). Secara lebih spesifik, manajemen laba mencerminkan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh manajer dengan cara menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya (Helmi et al., 2023). Selain itu, manajemen laba merupakan intervensi manajerial yang bertujuan memengaruhi besaran laba perusahaan yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, sehingga laba yang ditampilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi riil perusahaan.

Manajemen laba umumnya dilakukan dengan tujuan memengaruhi kualitas dan reliabilitas informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut sangat penting karena digunakan oleh investor, kreditor, regulator, dan pihak terkait lainnya untuk menilai kondisi keuangan serta kinerja operasional perusahaan (Sucipto et al., 2021). Manajemen laba dilakukan oleh pihak internal, khususnya manajer, melalui tindakan sengaja dan terencana dalam penyusunan laporan keuangan (Yahya & Laksito, 2022). Tindakan manipulatif ini sering kali dilatarbelakangi oleh motivasi pribadi atau insentif tertentu, seperti keinginan untuk memperoleh

bonus, menjaga stabilitas laba, atau memenuhi target kinerja tertentu (Nurhasan et al., 2023). Upaya ini menunjukkan strategi perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menekan beban pajak secara legal. Namun, secara etis, tindakan tersebut merupakan bentuk perilaku oportunistik yang berpotensi merugikan perusahaan karena dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan serta menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Rachmawati (2024), praktik manajemen laba riil dalam suatu perusahaan dapat diidentifikasi melalui indikator *cash flow from operation (CFO)*, *discretionary expense*, serta biaya produksi abnormal. Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya penurunan CFO dan peningkatan biaya penjualan yang berada di atas kondisi normal. Nilai CFO abnormal diperoleh melalui estimasi *standardized residual* yang dihasilkan dari model persamaan regresi tertentu sebagai berikut.

$$\frac{CFO_t}{A_{t-1}} = a_0 + a_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \beta_1\left(\frac{S_t}{A_{t-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{\Delta S_t}{A_{t-1}}\right) + \varepsilon_t$$

A_t adalah total aset akhir periode t , S_t merupakan penjualan periode t , dan ΔS_t adalah perubahan penjualan ($S_t - S_{t-1}$). Selanjutnya, *discretionary expense* diestimasi menggunakan model regresi berdasarkan Rachmawati (2024) sebagai berikut:

$$\frac{DISEXP_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1\frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2\frac{S_{t-1}}{A_{t-1}} + \varepsilon_t$$

Perusahaan meningkatkan produksi untuk menekan harga pokok penjualan. Biaya produksi periode t merupakan penjumlahan harga pokok

penjualan dan perubahan persediaan, yang kemudian diestimasi melalui model regresi biaya produksi normal sebagai berikut:

$$\frac{PROD_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2 \frac{S_t}{A_{t-1}} + \alpha_3 \frac{\Delta S_t}{A_{t-1}} + \alpha_4 \frac{\Delta S_{t-1}}{A_{t-1}} + \varepsilon_t$$

Alat analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yang mensyaratkan dilakukannya uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik yang umumnya diterapkan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan pendekatan analitis yang tetap menjaga keutuhan sampel. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis 1 hingga 3, digunakan persamaan regresi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$REM = (-AbnCFO) + -AbnDISEXP + AbnPROD$$

Manajemen laba riil (REM) merupakan ukuran komposit untuk mengidentifikasi praktik manipulasi laba melalui aktivitas operasional perusahaan yang terdiri dari arus kas operasi abnormal (AbnCFO), beban diskresioner abnormal (AbnDISEXP), dan biaya produksi abnormal (AbnPROD). AbnCFO dan AbnDISEXP yang rendah serta AbnPROD yang tinggi mencerminkan adanya praktik manipulasi operasional. Semakin tinggi nilai REM, semakin besar indikasi terjadinya manajemen laba riil.

2.1.4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu proses pengaturan dan pengendalian transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan kewajiban perpajakan, namun tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang

berlaku (Yuliana et al., 2022). Fenomena ini menggambarkan usaha perusahaan dalam memanfaatkan peluang yang disediakan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal (Nurhasan et al., 2023). Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dipahami sebagai tindakan strategis untuk menghindari pemungutan pajak secara legal melalui pengalokasian transaksi kepada pos atau kegiatan yang tidak menjadi objek pajak (Purba et al., 2024). Lebih lanjut, perencanaan pajak dalam konteks ini juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan mendasar antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga mendorong manajemen untuk memilih perlakuan akuntansi tertentu yang memberikan dampak optimal terhadap beban pajak perusahaan (Lengkey et al., 2025). Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yang mencerminkan besarnya beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Rumus *Effective Tax Rate* (ETR):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan (Anindya & Yuyetta, 2020). Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dari aktivitas operasionalnya dan menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Bora & Iswara, 2021). Selain itu, profitabilitas juga berfungsi sebagai alat analisis dalam membandingkan laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan (neraca) maupun laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi finansial perusahaan (Safitri & Sipayung, 2024). Lebih jauh, tingkat profitabilitas dapat diobservasi secara periodik untuk menilai perkembangan perusahaan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut dalam rentang waktu tertentu (Paramitha, 2025). Beberapa jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan dalam analisis keuangan meliputi profit margin on sales, *return on investment* (ROI), *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), serta laba per saham (*earning per share*/EPS).

Perusahaan pada dasarnya bertujuan memperoleh laba optimal sebagai dasar keberlangsungan usaha serta kesejahteraan pemilik, pemegang saham, dan karyawan. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan menarik minat investor, namun profitabilitas yang terlalu tinggi juga berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap kemungkinan manipulasi laporan keuangan. Kondisi ini dapat meningkatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pihak eksternal, sehingga manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan *return on equity* (ROE) karena rasio ini menunjukkan kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rumus *Return on Equity* (ROE):

Menunjukkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Rumus *Return on Assets* (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Rumus *Return on Investment*

Mengukur kemampuan investasi menghasilkan keuntungan.

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Investasi}}$$

2.1.6. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan salah satu komponen yang paling krusial dalam struktur (*good corporate governance/GCG*). Keberadaan komisaris independen memiliki nilai strategis karena mereka diharapkan memberikan pengawasan yang objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun pengaruh manajemen (Sucipto et al., 2021). Komisaris independen umumnya memiliki kompetensi, pengalaman, serta pengetahuan khusus mengenai operasional perusahaan, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Frans, 2021).

Melalui fungsi pengawasan dan konsultatif tersebut, dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis serta memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* (Ratu & Yuniarwati, 2025). Selain itu, mereka berperan mengawasi kebijakan dan memastikan operasional perusahaan selaras dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan (Marenda et al., 2025). Pengukuran dalam dewan komisaris independen:

$$DKI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota komisaris}}$$

2.1.7. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu organ pendukung yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih efektif, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi perusahaan (Saputra & Yuniarta, 2025). Komite ini bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dan berperan sebagai penghubung antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal dalam memastikan kualitas serta integritas informasi keuangan yang disajikan perusahaan (Dompas & Yudhanti, 2024). Keanggotaan komite audit dapat terdiri atas satu atau lebih individu yang berasal dari dewan komisaris maupun pihak eksternal yang memiliki kompetensi profesional, keahlian teknis, serta pengalaman yang relevan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan optimal (Sicaprio et al., 2024).

Komite audit memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan, termasuk dalam mendeteksi dan mencegah potensi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (alfiyasahra et al., 2020). Selain mengawasi kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku, komite audit juga berfungsi menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan sehingga informasi yang disajikan kepada publik mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Sari & Susilowati, 2021). Peran ini secara tidak langsung membangun dan memperkuat kepercayaan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas pengelolaan perusahaan (Setyani & Suhaili, 2023). Keberadaan komite audit dipandang sebagai elemen penting yang menjembatani komunikasi dan koordinasi antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen dalam menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran dalam komite audit sebagai berikut :

Komite Audit= Jumlah anggota komite audit

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari reseach gap penelitian-penelitian terdahulu didapatkan temuan, sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Peneliti, tahun dan judul	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nazila & Challen, 2020) Pengaruh Kualitas Komite Audit dan	1. Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba?	Metode : Kuantitatif Populasi : perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit Independen mempunyai
2	(Bora & Iswara, 2021) Peran Kepemilikan Manajerial Dalam Moderasi Pengukuran Perusahaan , Profitabilotas , dan Leverage Terhadap Manajemen Laba	1. Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. 2. Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. 3. Leverage terhadap Manajemen Laba. 4. Kepemilikan Manajerial dalam memoderasi pengaruh ketiga variabel di atas terhadap Manajemen Laba.	Metode kuantitatif Populasi: Perusahaan subsektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023. Sampel: Sebanyak 15 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , menghasilkan total 60 data pengamatan selama periode 4 tahun tersebut.	Hasil menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara Profitabilitas dan Leverage berpengaruh negatif, dengan Kepemilikan Manajerial hanya memperkuat pengaruh Ukuran Perusahaan dan tidak memoderasi pengaruh Profitabilitas dan Leverage
	Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Laba, dengan studi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.	2. Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba? 3. Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba? 4. Keahlian Komite Audit terhadap Manajemen Laba? 5. Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Laba?	manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 sampel sebanyak 16 perusahaan (48 data pengamatan) yang diperoleh melalui teknik <i>purposive sampling</i> menggunakan analisis regresi berganda.	pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba, sementara variabel lainnya (Ukuran Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite Audit, Keahlian Komite Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

3	(Yahya & Laksito, 2022) pengaruh perencanaan pajak,	1. Perencanaan pajak terhadap manajemen laba. 2. Penghindaran pajak terhadap manajemen laba.	metode kuantitatif dengan mengambil populasi perusahaan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
	penghindaran pajak, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	3. Beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.	sektor keuangan di BEI periode 2020-2022 dan menganalisis sampel sebanyak 158 data menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap manajemen laba.
4	(Sicaprio et al., 2024) Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).	1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba secara parsial. 2. Pengaruh komite audit terhadap manajemen laba secara parsial. 3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba secara parsial. 4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba secara parsial.	Metode: Kuantitatif. Populasi: 81 perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel: Dipilih menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> berdasarkan kriteria tertentu untuk periode pengamatan tahun 2019–2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, namun Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan secara simultan (bersama-sama) keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5	(Limmousine & Christian, 2024) Judul: Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.	1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba? 2. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba? 3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 4. Apakah kepemilikan	Metode penelitian Jenis penelitian: Kuantitatif Pendekatan: Data panel Periode penelitian: 2018–2023 Populasi: 226 perusahaan manufaktur di BEI Sampel: 122 perusahaan	Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar mekanisme tata kelola perusahaan—termasuk dewan komisaris independen, komite audit independen, kebijakan dividen, dewan direksi independen, serta ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional—berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara kepemilikan manajerial tidak menunjukkan

		institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba? 6. Apakah jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba? 7. Apakah dewan direksi independen berpengaruh terhadap manajemen laba?	(purposive sampling)	pengaruh signifikan.
--	--	---	----------------------	----------------------

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan teoretis antara variabel independen yang terdiri dari penghindaran pajak, profitabilitas, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen. Penyusunan kerangka ini berlandaskan pada teori agensi yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan serta ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent dapat mendorong manajer melakukan perilaku oportunistik, termasuk praktik manajemen laba.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan upaya manajemen memanfaatkan celah regulasi perpajakan guna menurunkan beban pajak perusahaan. Aktivitas ini memberikan fleksibilitas bagi manajer dalam melakukan penyesuaian terhadap komponen laba, sehingga dalam perspektif teori agensi praktik penghindaran pajak berpotensi membuka ruang bagi meningkatnya tindakan manajemen laba. Semakin agresif strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula peluang manajemen melakukan intervensi terhadap angka akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk efisiensi pajak maupun pencapaian target kinerja.

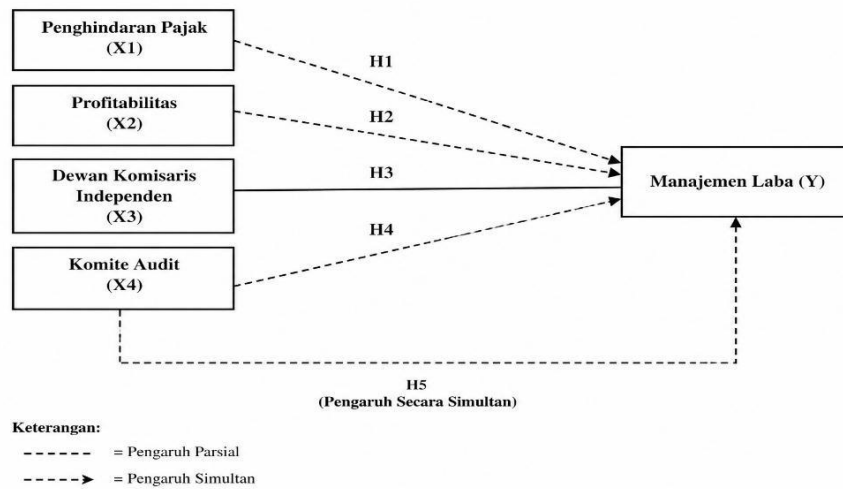
Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang menjadi perhatian utama pemegang saham dan *investor*. Tingkat profitabilitas yang tinggi maupun rendah dapat menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk menampilkan kinerja laba yang stabil dan menarik di mata pasar. Kondisi tersebut dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, profitabilitas yang berfluktuasi dapat mendorong manajemen melakukan penyesuaian akuntansi guna menjaga reputasi perusahaan serta mempertahankan kepercayaan investor.

Dewan komisaris independen dipandang sebagai mekanisme pengawasan internal yang berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu memperkuat fungsi monitoring terhadap tindakan manajemen, sehingga dapat menekan peluang terjadinya praktik manajemen laba. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat pula independensi pengawasan yang dilakukan. Dengan pengawasan yang lebih objektif dan profesional, komisaris independen diharapkan mampu mendorong manajemen untuk menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Komite audit berfungsi sebagai pendukung dewan komisaris dalam memastikan proses pelaporan keuangan berjalan sesuai standar akuntansi dan prinsip kehati-hatian. Komite audit yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap laporan keuangan, sehingga potensi rekayasa laba oleh manajemen dapat diminimalisasi. Selain itu, komite audit juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal, sehingga proses pengendalian internal perusahaan menjadi lebih kuat dan transparansi laporan keuangan semakin terjamin.

Kerangka konseptual ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian serta mengarahkan analisis empiris untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Gambar 2.3.1. Kerangka konseptual



2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terukur mengenai setiap variabel yang digunakan. Adapun definisi operasional masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Definisi Operasional dan pengukuran variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Sumber	Skala
1.	Manajemen laba	Manajemen laba riil merupakan tindakan manajer dalam memodifikasi aktivitas operasional perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan melalui manipulasi arus kas operasi, produksi, dan beban diskresioner.	Rumus Model Manajemen Laba Riil (Rachmawati, 2024) Arus Kas Operasi Abnormal (Abnormal CFO) $\frac{CFO_t}{A_{t-1}} = a_0 + a_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \beta_1\left(\frac{S_t}{A_{t-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{\Delta S_t}{A_{t-1}}\right) + \varepsilon_t$	(Wafare tta & Restuningdiah, 2018)	Rasio
2.	Penghindaran pajak	Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melakukan	Pengukuran dalam penghindaran pajak : $ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Gabrielli, 2023)	Rasio
3.	Profitabilitas	Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya. Digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan.	Pengukuran dalam profitabilitas : $ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$	(Rusiyati et al., 2025)	Rasio
4.	Dewan Komisaris	Proporsi anggota	Pengukuran dalam dewan komisaris		Rasio

	Independen	dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, keluarga, atau afiliasi dengan manajemen sehingga mampu melakukan fungsi pengawasan secara objektif	independen: $DKI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota komisaris}}$		
5.	Komite Audit	Struktur pengawasan perusahaan yang bertugas memantau pelaporan keuangan, audit, dan kepatuhan tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan.	Pengukuran dalam komite audit : Komite Audit= Jumlah anggota komite audit	(Rusiyati et al., 2025) (Wibowo, 2023)	Angka

2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Yahya & Laksito, 2022). Meskipun bersifat legal, praktik tersebut dapat mencerminkan kecenderungan manajemen dalam mengoptimalkan kepentingan perusahaan melalui kebijakan pelaporan keuangan tertentu (Purba et al., 2024). Sementara itu, dalam perspektif teori agensi Jensen & Meckling (1976), penghindaran pajak berpotensi menjadi konsekuensi dari

konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Adanya asimetri informasi memberikan peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya, termasuk melakukan pengelolaan laba guna mencapai target kinerja, memperoleh kompensasi, atau mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, semakin besar peluang terjadinya praktik manajemen laba apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Sementara itu, teori *stakeholder* Freeman (1984) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai dan menjaga kepercayaan seluruh *stakeholder*, seperti *investor*, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan penghindaran pajak yang disertai praktik manajemen laba dapat mengurangi transparansi dan kualitas laporan keuangan sehingga berpotensi menimbulkan asimetri informasi serta menurunkan tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola kewajiban perpajakannya secara wajar dan menyajikan informasi keuangan secara transparan akan lebih mampu mempertahankan legitimasi serta memenuhi ekspektasi para *stakeholder*. Dengan demikian, teori *stakeholder* memberikan landasan bahwa keputusan manajemen tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian Yuliana et al. (2022) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba karena perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba dalam rangka menekan beban pajak dan meningkatkan

kinerja yang dilaporkan. Sebaliknya, Yahya & Laksito (2022) menemukan bahwa ketika pengawasan eksternal semakin kuat dan risiko sanksi meningkat, penghindaran pajak justru dapat menurunkan kecenderungan manajemen melakukan manipulasi laba. Temuan tersebut sejalan dengan Karina & Liliana (2025), yang menyatakan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan serta tingginya risiko reputasi mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen. Berdasarkan teori agensi, teori *stakeholder*, dan hasil penelitian terdahulu, hubungan antara penghindaran pajak dan manajemen laba masih menunjukkan hasil yang beragam sehingga memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa :

H₁ : Penghindaran Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

2.5.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham, yang dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Rasio ini mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan pengembalian bagi pemegang saham. Dalam perspektif teori agensi Jensen & Meckling (1976), tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja keuangan agar sesuai dengan harapan pemegang saham. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik melalui praktik manajemen

laba apabila target laba sulit dicapai (Fatmala & Riharjo, 2022). Asimetri informasi antara *principal* dan *agent* memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk melakukan intervensi terhadap pelaporan keuangan demi memperoleh kompensasi, mempertahankan reputasi perusahaan, atau memenuhi kontrak berbasis laba (Helmi et al., 2023). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan manajemen melakukan praktik manajemen laba.

Di sisi lain, teori *stakeholder* Freeman (1984) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholder*, bukan hanya bagi pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi indikator penting bagi *investor*, kreditur, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya dalam mengevaluasi prospek perusahaan. Oleh karena itu, informasi laba yang disajikan harus mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar, transparan, dan akuntabel (Astria et al., 2021). Apabila laba yang tinggi diperoleh melalui praktik manajemen laba, maka kualitas pelaporan keuangan akan menurun dan berpotensi mengurangi kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mempertahankan profitabilitas secara berkelanjutan melalui kinerja operasional yang sesungguhnya akan memperoleh legitimasi yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kualitas informasi keuangan yang disampaikan (Lie & Setyani, 2023). Bukti empiris juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif mampu menekan praktik manajemen laba sehingga kualitas pelaporan keuangan tetap terjaga.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas dan manajemen laba masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian Siwi et al. (2025) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif untuk mempertahankan kinerja laba yang dilaporkan. Sebaliknya, penelitian Tulcanaza-Prieto & Lee (2022) menunjukkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik mampu membatasi praktik *real earnings management* meskipun perusahaan memiliki kinerja keuangan yang tinggi. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola perusahaan, kualitas pengawasan, serta karakteristik perusahaan. Berdasarkan teori agensi, teori stakeholder, dan hasil penelitian terdahulu, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE) diduga berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga hubungan tersebut perlu dibuktikan melalui pengujian empiris.

H₂ : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

2.5.3. Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang berfungsi mengawasi kebijakan serta kinerja manajemen secara independen. Dalam perspektif teori agensi Jensen & Meckling (1976) keberadaan dewan komisaris independen bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* melalui pelaksanaan fungsi monitoring yang efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen.

Sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan direksi atau pemegang saham pengendali, dewan komisaris independen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional (Immanuel & Hasnawati, 2022). Pengawasan tersebut berperan dalam mengurangi asimetri informasi, membatasi perilaku oportunistik manajemen, serta meminimalkan praktik manajemen laba yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan (Setyani & Suhaili, 2023). Dengan demikian, semakin efektif fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris independen, semakin kecil peluang manajemen melakukan manipulasi terhadap informasi keuangan perusahaan.

Dalam perspektif teori *stakeholder* Freeman (1984) dewan komisaris independen memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholders* melalui pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintah, dan masyarakat (Safitri & Sipayung, 2024). Oleh karena itu, dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kualitas pelaporan keuangan sehingga informasi yang disampaikan kepada para *stakeholders* mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pengawasan yang independen tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Khaerunnisa &

Soerono, 2025). Dengan demikian, dewan komisaris independen menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam membatasi praktik manajemen laba serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Immanuel & Hasnawati (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena peningkatan kualitas pengawasan mampu memengaruhi perilaku manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Sebaliknya, Setyani & Suhaili (2023) menemukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum tentu mampu menekan praktik manajemen laba apabila fungsi pengawasan belum dijalankan secara optimal. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas dewan komisaris independen dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan *good corporate governance* (Nurhasan et al., 2023). Berdasarkan teori agensi, teori *stakeholder*, dan hasil penelitian terdahulu, dewan komisaris independen diperkirakan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, pengaruh tersebut masih memerlukan pembuktian empiris secara lebih mendalam karena bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan perusahaan.

H₃ : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

2.5.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Nazila & Challen, 2020). Dalam perspektif teori agensi, keberadaan komite audit bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* melalui pengawasan yang efektif terhadap penyusunan laporan keuangan dan aktivitas manajemen. Komite audit berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi serta membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk praktik manajemen laba (Dompas & Yudhanti, 2024). Untuk mendukung efektivitas pengawasan, komite audit diwajibkan menyelenggarakan rapat secara berkala sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04, sehingga koordinasi dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dapat dilakukan secara berkesinambungan (Hendra et al., 2024). Dengan demikian, semakin efektif pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komite audit, semakin kecil peluang manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan.

Dalam perspektif teori *stakeholder* Freeman (1984) komite audit memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan seluruh *stakeholders* melalui pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta

kredibilitas informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Karina & Liliana, 2025). Pengawasan yang efektif oleh komite audit tidak hanya meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap kualitas informasi keuangan, tetapi juga memperkuat integritas perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik. Dengan demikian, komite audit menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam membatasi praktik manajemen laba serta mendukung terciptanya *good corporate governance* yang efektif dan berkelanjutan dan optimal (Sarah et al., 2023).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit terhadap manajemen laba masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Sari & Hasnawati (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba karena efektivitas pelaksanaan rapat serta keterlibatan aktif anggotanya mampu memperkuat pengendalian internal dan mengurangi peluang terjadinya rekayasa laba oleh manajemen. Sebaliknya, Khaerunnisa & Soerono (2025) menemukan bahwa komite audit dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba apabila fungsi pengawasan belum dijalankan secara optimal. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komite audit dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, frekuensi rapat, serta kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Berdasarkan teori agensi, teori *stakeholder*, dan hasil penelitian terdahulu, komite audit diperkirakan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, pengaruh

tersebut masih memerlukan pembuktian empiris karena bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan perusahaan.

H₄ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

